

**ENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ERA OTONOMI DAERAH  
DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2009-2010  
(Studi Kasus Kebijakan Pelayanan Publik di bidang Perijinan)**

**SKRIPSI**



**MEGA SUCI**  
**20040520224**

**ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
2010**

**ENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ERA OTONOMI DAERAH  
DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2009-2010  
(Studi Kasus Kebijakan Pelayanan Publik di bidang Perijinan)**

**SKRIPSI**

**Disusun Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada  
Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Muhammadiyah  
Yogyakarta**

**Disusun Oleh :**

**Mega suci**

**20040520224**

**ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
2010**

# LEMBAR PENGESAHAN

## SKRIPSI

Dengan Judul :


“PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ERA OTONOMI DAERAH  
DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2009 – 2010”  
(Studi Kasus Kebijakan Pelayanan Publik di Bidang Perijinan)

Telah dipertahankan dalam ujian pendadaran, dinyatakan lulus dan disahkan  
Didepan Tim Penguji Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

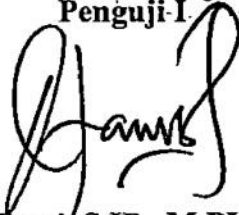
Pada  
Hari/Tanggal : Kamis, 23 Desember 2010  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang FISIPOL UMY

### SUSUNAN TIM PENGUJI

Ketua Penguji

  
Drs. Uling Pribadi, M.Si

Penguji I



Utami Dewi, S.IP., M.PUB.POL

Penguji II



Dra. Atik Septi Winarsih, M.Si

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

  
Dr. Suranto, M.POL

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu perguruan tinggi manapun. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Selanjutnya apabila di kemudian hari terbukti terdapat duplikasi, dan ada pihak lain yang merasa dirugikan dan menuntut, maka saya akan bertanggung jawab dan menerima segala konsekuensi yang menyertainya.

Yogyakarta, Desember 2010

Yang membuat pernyataan

Mega Suci

## MOTTO

Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusus

(Qs.2 ayat 45)

Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan.....

(Qs.Al-insyirah : 6)

- Selama dirimu masih bisa berfikir, maka berfikirilah menjadi orang besar  
(Donal Trump)

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena dengan rahmat nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ERA OTONOMI DAERAH (STUDI KASUS KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PERIJINAN).”

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Sehubungan dengan itu, pada kesempatan ini penulis mengungkapkan rasa penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ulung Pribadi Ms.i selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, dan koreksi yang sangat bermanfaat selama penulisan skripsi ini berlangsung.
4. Seluruh Dosen beserta segenap staff di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
5. Seluruh responden penelitian yang telah bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.
6. Kedua orangtuaku yang selalu setia memberikan dukungan, semangat, dan dalam setiap untaian doa kalian untuk memohonkan kepada Allah SWT demi keberhasilan penulis.
7. Teman-teman penulis di jurusan Ilmu Pemerintahan yang sudah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.
8. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT memberikan limpahan rahmat dan berkah-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya selama ini.

Untuk kritik dan saran membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

Yogyakarta, 07 Januari 2011

Mega Suci

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
ABSTRAKSI .....	iv
<b>AB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Kerangka Dasar Teori.....	9
1. Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan.....	9
2. Otonomi Daerah.....	14
3. Kebijakan Publik .....	18
4. Implementasi Kebijakan .....	24
5. Perizinan dan Pelayanan Publik.....	27
D. Definisi Konsep .....	28
E. Definisi Operasional .....	29
1. Indikator Kebijakan Publik yang Berkaitan dengan Bidang Perizinan .....	29
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik .....	30
F. Metode Penelitian.....	30
<b>AB II DESKRIPSI WILAYAH OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Profil Kabupaten Sleman.....	33
1. Sejarah Sleman .....	33
2. Letak Wilayah.....	34
3. Luas Wilayah.....	34
4. Visi dan Misi .....	36
5. Kelembagaan .....	37
B. Dinas Perijinan Kabupaten Sleman .....	40
1. Sejarah Dinas Perizinan.....	40
2. Kewenangan Dinas Peizinan .....	41
C. Tinjauan Kelembagaan Sistem-sistem Pelayanan Investasi Terpadu yang diterapkan di Indonesia.....	50
1. Sistem Pelayanan Satu Pintu ( One-Roof System).....	50
2. Aspek-aspek Sistem Kelembagaan.....	52
<b>AB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman di Bidang Perijinan.....	58
B. Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Sleman	83
<b>AB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran .....	108

## **ABSTRAKSI**

Ada tiga kebijakan yang memberi kontribusi arogansi birokrasi yaitu (1) strategi pembangunan yang menggunakan pendekatan *top-down* ; (2) UU No 5 Tahun 1974 ; (3) Bupati baik yang berasal dari sipil maupun militer. Implementasi kebijakan publik desentralisasi ke depan harus menekankan prinsip-prinsip *good governance* pada fungsi-fungsi regulasi, pelayanan publik dan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Hal ini berarti kebijakan publik yang di implementasikan dalam sistem administrasi publik di daerah kabupaten/kota benar-benar menerapkan prinsip *good governance* serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif. Dalam melakukan penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman yang berkaitan dengan masalah Kebijakan Perijinan dan implementasinya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka berupa dokumentasi mengenai pelayanan perijinan beserta peraturan perundang-undangannya.

Hasil penelitian menunjukkan Model Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu yang dapat diterapkan di Kabupaten Sleman sesuai dengan Keputusan Menteri Negeri Nomor Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman organisasi dan tatakerja unit pelayanan perijinan terpadu di daerah berbentuk kantor berdasarkan variabel besaran organisasi perangkat daerah. Kinerja dari pelayanan public di kabupaten Sleman menurut hasil penelitian masih banyak dijumpai permasalahan dibandingkan dengan pelayanan yang baik seperti misi dari Unit Pelayan Terpadu satu atap kabupaten Sleman (UPTSA) Kab. Sleman.

**Kata Kunci : Pelayanan Publik, Perijinan, UPTSA**